

ARTIKEL PENELITIAN
DANA SPP-DPP UNAND 1999
NO. 91/LPUA//SPP-DPP/M/X/1999

**Kegagalan Pembangunan Sosial Orde Baru:
Suatu Tinjauan Teoritik**

Oleh: DAHIRUL DAHLAN, SH

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1999

ARTIKEL PENELITIAN

Kegagalan Pembangunan Sosial Orde Baru: Suatu Tinjauan Teoritik

Abstrak

Pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya mengikuti teori pembangunan modernisme Barat yang memberikan penekanan pada aspek pembangunan ekonomi. Kebanyakan pembangunan tersebut mengalami kegagalan. Hal ini, khususnya kasus pembangunan sosial di Indonesia yang dilaksanakan oleh rejim Orde Baru, penting ditinjau kembali dari segi teoritik dengan pertanyaan utama kenapa terjadi kegagalan tersebut. Tinjauan teoritik dimaksudkan mengkaji masalah orientasi pembangunan dari dasar-dasar pemikiran filosofis. Metode yang dipakai untuk menjawab masalah ini dengan penelitian pustaka dan pengamatan terhadap kebijaksanaan pembangunan tersebut serta analisis kualitatif.

Pembangunan model Barat ternyata didasarkan kepada pandangan positivistik dan modernisme yang hanya memperhatikan aspek ekonomi dan faktor-faktor empirik lainnya dengan mengenyampingkan aspek moral, nilai-nilai budaya dan agama. Karena itu penerapannya punya dampak negatif terhadap kondisi sosial, budaya dan lingkungan. Pada aspek moral, budaya dan agama yang tidak dapat dilepaskan dari orientasi pembangunan sosial suatu masyarakat. Akibatnya ketika model ini diterapkan pada masyarakat yang punya nilai budaya yang berbeda, sebagaimana juga berdampak negatif secara global, ternyata gagal, termasuk dalam bidang ekonomi itu sendiri. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang masih rendah, dengan secara formal menerapkan model ekonomi liberal kapitalisme dan demokrasi politik, mengakibatkan berbagai krisis seperti yang dialami di akhir pemerintahan Orde Baru dan model tersebut beralih menjadi ekonomi oligopoli dan kekuasaan absolut rejim yang berkuasa.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dijadikan jargon dalam pemerintahan Orde Baru terbukti gagal. Berbagai krisis dialami bangsa Indonesia sebelum dan sesudah bergantinya kepemimpinan nasional. Kegagalan pembangunan sektoral, seperti sektor ekonomi, hukum dan politik tidak hanya sebatas sektor yang bersangkutan saja, tetapi juga berdampak yang lebih jauh pada pembangunan sosial, dalam arti juga mengakibatkan kegagalan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kegagalan tersebut tidak hanya karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menghasilkan sektor yang diprogramkan. Faktor sosial budaya mungkin sekali diabaikan, baik ketika merumuskan tujuan maupun ketika operasionalisasi suatu program. Ini berarti kekurangan pembangunan zaman Orde Baru, demikian juga di banyak negara Dunia Ketiga, tidak hanya pada level praktis dan teknis, tetapi lebih jauh adalah pada level teoritik. Teori pembangunan yang diterapkan di Dunia Ketiga berasal dari teori pembangunan aliran modernisme Barat yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pasar atau ekonomi liberal kapitalistik.

Kemajuan pembangunan dengan ilmu dan teknologi moderen yang semula dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia, menimbulkan pula akibat sampingan yang dirasakan membahayakan kehidupan manusia, seperti pencemaran lingkungan, terkurasnya sumber daya alam, dsb. Bahkan dalam skala dunia, masalah sosial semakin serius, seperti dalam bentuk tindak kejahatan, terorisme, peperangan, besarnya jurang pemisah antara negara kaya dan negara miskin (Badley 1976; Toffler 1970). Lebih dari itu, di dunia ketiga model pembangunan tersebut mengalami kegagalan.

Di samping itu model pembangunan suatu masyarakat berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Maka diskursus masalah pembangunan dalam level teoritik tidak kalah penting dari analisis kendala pembangunan dari sudut teknis, praktis dan operasional. Dengan demikian penelitian ini diberi judul *Kegagalan Pembangunan Sosial Orde Baru: Suatu Tinjauan Teoritik*.

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan demikian masalah penelitian adalah sejauh manakah pilihan pembangunan di zaman Orde Baru punya landasan teoritik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ini dapat juga diungkap dengan kalimat lain, sebab-sebab teoritik apakah yang melatarbelakangi kegagalan teori pembangunan Orde Baru?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan landasan teoritik pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini penting untuk sumbangan pemikiran dalam merumuskan kembali arah dan landasan pembangunan Indonesia Baru atau merumuskan arah reformasi sosial, ekonomi, politik dan hukum.

Metode Penelitian

Terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian kata-kata penting yang dipakai dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan *pembangunan sosial* adalah pembangunan yang ditujukan terhadap manusia dan masyarakat. Istilah ini tidak membatasi kajian pada aspek ekonomi saja, walaupun bidang ekonomi juga penting

bagi manusia. Aspek-aspek yang ditunjukkan pada masalah pengembangan sumber daya manusia secara individu dan masyarakat menjadi perhatian istilah ini.

Yang dimaksud dengan *tinjauan teoritik* adalah tinjauan yang mencari hubungannya dengan pemikiran, budaya atau ideologi yang ada. Dengan demikian tinjauan bersifat diskursus rasional dan pemikiran filosofis, tidak terlalu tergantung kepada data empirik kuantitatif.

Maka data yang diperlukan adalah data pemikiran dari para penulis dan pendapat-pendapat yang dikemukakan dari pengamatan terhadap arah dan pelaksanaan pembangunan di zaman Orde Baru. Analisis data dilakukan secara kualitatif, kritis dan filosofis. Dengan demikian penelitian ini merupakan *library research*.

Setelah pendahuluan, akan dikemukakan berbagai teori pembangunan sosial dan diskusi antar teori tersebut, arah pembangunan sosial Orde Baru dalam teori dan praktek dan hubungannya dengan teori pembangunan sosial. Perhatian ditujukan kepada pembangunan di bidang ekonomi, politik, hukum dan agama.

Tinjauan Pustaka

Arah dan dasar-dasar pembangunan di Dunia Ketiga termasuk kajian sosiologi pembangunan yang merupakan cabang sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan atau menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam perubahan atau transformasi suatu masyarakat dari suatu keadaan ke keadaan lain. Selain faktor yang berpengaruh itu, cabang sosiologi ini juga mengkaji bentuk perubahan itu sendiri, misalnya dari agraris ke industri, dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh proses perubahan itu (Long 1992:7-11; Goldthorpe 1992:1-29).

Kajian ilmu-ilmu sosial selama ini terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan ditujukan kepada faktor-faktor ekonomis teknis yang bersifat empiris. Kekurangan tinjauan ini adalah karena masing-masing dikembangkan dari satu paradigma atau aliran pemikiran tertentu, yaitu positivisme. Akibatnya kajian terhadap aliran pemikiran itu sendiri jadi tertutup. Penggalan terhadap faktor yang lebih dalam tidak dapat peluang. Kajian pada level teoritik yang bertolak dari latar belakang kondisi sosial budaya Dunia Ketiga itu sendiri, khususnya Indonesia, masih langka. Pada umumnya kajian-kajian tersebut dikembangkan dari paradigma atau pemikiran modernisme itu sendiri. Karena itu penulis merasa tinjauan teoritik ini perlu dilakukan, apalagi dalam menghadapi Era Reformasi. Perubahan dalam Era Reformasi tidak seyogyanya dibatasi pada hal-hal teknis empiris saja. Perubahan terhadap dasar tempat berangkatnya proses pembangunan itu patut ditinjau dan diperbaiki lagi (Soedjatmoko 1984). Yang berkontribusi dalam menulis buku *Krisis Teori Pembangunan di Dunia Ketiga* (1984) pada umumnya tidak mendiskusikan masalah-masalah teoritik, tetapi lebih banyak pada aspek metodologis dan hal-hal-hal teknis, dengan pengecualian tulisan Amien Rais, Soedjatmoko dan Hidayat Nataatmadja dalam buku tersebut. Namun diskursus teoritik lintas ideologis tidak hampak dalam tulisan-tulisan tersebut. Di Amerika Latin memang telah berkembang teori pembangunan Neo-Marxis (Long 1992). Tetapi pendekatan terakhir ini juga masih patut didiskusikan, sebagaimana teori Marxis sendiri juga telah terbukti gagal yang tentunya erat kaitannya dengan landasan teoritik. Di Barat sendiri pendekatan modernisme juga telah dikritik oleh aliran Postmodernisme (Lenz dan Shell 1986; Seidman dan Wagner 1992).

H. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN SOSIAL.

Pembangunan suatu negara atau masyarakat menyangkut berbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial dan budaya dengan berbagai aspeknya. Semua usaha pembangunan itu, walaupun menunjukkan perhatian atau memprioritaskan aspek tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi misalnya, sebenarnya dikembangkan dari pemikiran filosofis yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan.

Sosiologi pembangunan, sebagai bidang kajian yang ditujukan kepada mencari manusia teoritis terhadap pembangunan di Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang, dikembangkan oleh ilmuwan Barat. Karena itu landasan-landasan filosofis dari arah pembangunan yang ditontarkan dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran di Barat itu sendiri. Berikut ini dikemukakan teori-teori pembangunan sosial yang dikembangkan dari ahli Barat.

Pemikiran moderen di Eropa dapat dikatakan dimulai dari gerakan Renaissance yang dimulai pada abad ke 14. Renaissance berarti lahir atau bangkit kembali, karena mayoritas anggota masyarakat lapisan bawah adalah budak yang bekerja di ladang atau perkebunan luas tanah atau kaum feodal. Kaum feodal bekerja sama dengan kaum gereja dan kaum bangsawan. Ketiga elit masyarakat ini adalah kelas penindas terhadap mayoritas anggota masyarakat Eropa (Gilson 1938; Hadiwiyono 1994). Karena itu gerakan atau semangat Renaissance berjuang melepaskan diri dari kungkungan ketiga elit yang menguasai masyarakat Eropa tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami kenapa Revolusi Perancis yang meletus tahun 1789 digerakkan dengan semboyan *liberte, egalite et fraterute* (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan). Kebebasan yang hendak direbut adalah bebas dari kungkungan Gereja, kediktatoran kaum kerajaan dan penghisapan kaum feodal. Persamaan adalah persamaan antar umat manusia. Tidak ada lagi hak dan kekuasaan istimewa kaum Gereja, kaum bangsawan dan kaum feodal Wallbank dan Schrier (1974:290-343).

Pemberontakan terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut melahirkan berbagai pemikiran filosofis yang kemudian berkembang menjadi ideologi atau paradigma ilmu, seperti pemikiran materialisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, idealisme, rasionalisme, pragmatisme, bahkan sampai fasisme (Hadiwiyono 1994). Tetapi yang berkembang sampai dewasa ini dapat dibagi kepada dua pemikiran utama, yaitu kapitalisme dan sosialisme, walaupun konsep murni dari kedua ideologi ini hampir tidak ditemukan lagi dalam praktek. Keduanya telah mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Sehubungan dengan pengantar di atas, berikut ini akan dikemukakan lebih dahulu teori pembangunan dalam pemikiran sosialisme. Kemudian diikuti dengan tinjauan teori pembangunan dalam pemikiran liberal kapitalisme karena tampak makin dominan dalam pereaturan dunia dewasa ini. Lalu dikemukakan pula pembangunan sosial dalam perspektif Islam.

a. Sosialisme

Pemikiran sosialisme yang ditampikan oleh Karl Marx adalah reaksi terhadap sistem yang dilahirkan dari pemikiran kapitalisme. Karl Marx mengujat kekayaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis adalah hasil keringat kaum buruh yang diistilahkan dengan

kaum proletar. Kaum kapitalis, sesuai dengan prinsip mencari untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, memberikan gaji buruh seminimal mungkin tetapi menuntut produksi atau kerja sebesar mungkin. Kondisi ini tentu tidak bisa ditahan terus menerus oleh kaum buruh. Mereka punya batas kesabaran. Akhirnya mereka merebut segala faktor-faktor produksi yang dimiliki kaum kapitalis dan menjadikannya hak milik rakyat secara bersama-sama. Dengan jatuhnya hak milik kaum borjuis, yaitu para kapitalis ke tangan rakyat atau kaum proletar, sumber yang menjadikan manusia saling bersengketa satu sama lain dalam bentuk pencurian, pemerasan, perkelahian, penipuan, bahkan peperangan, yaitu semuanya terjadi karena memperebutkan hak milik, dapat dihilangkan. Dengan bergantinya sistem hak milik pribadi kepada hak milik bersama, menurut Marx akan terciptalah keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial yang hakiki. Maka masyarakat ideal dalam konsep Karl Marx adalah masyarakat *komunis* yang ditandai dengan tidak adanya lagi hak milik pribadi. Pada masyarakat sosialis, hak milik pribadi masih diizinkan, tetapi terbatas kepada benda dan faktor produksi yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup individu. Barang mewah dan faktor produksi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak atau punya skala besar harus menjadi hak milik rakyat atau kaum proletar. Maka masyarakat sosialis hanyalah masyarakat transisi menuju masyarakat komunis. Tetapi ramalan Marx yang mengatakan bahwa sejarah akan dimenangkan oleh revolusi kaum borjuis, ternyata tidak benar. Jangankan masyarakat komunis akan menang melawan kapitalisme, sosialisme Uni Soviet pun runtuh berantakan. Perlu didiskusikan secara ringkas kenapa ramalan Marx meleset.

Jawaban pertanyaan ini dapat kita tarik kepada pandangan filsafat Marx tentang manusia. Terpengaruh oleh pandangan Thomas Hobbes yang mengatakan manusia adalah serigala yang saling terkau menerkam satu sama lain (*homo homini lupus*), adalah pandangan yang terlalu mereduksi eksistensi manusia. Manusia direduksi kepada dimensi iblisnya dan fisik saja. Hati nurani manusia yang selalu menyeru kepada yang baik, nilai-nilai moral yang bersifat universal dan kepuasan manusia terletak pada apresiasi rohaniannya dilupakan atau sengaja diingkari oleh Marx. Maka dari segi pemikiran filosofis, teori Marx mempunyai dua kesalahan besar, *pertama* karena mengingkari eksistensi rohaniyah dan religiusitas dari wujud manusia dan *kedua* karena mengingkari individualitas manusia. Kedua hal ini adalah hal mendasar dari kehidupan manusia. Segala pemikiran yang mengulungkan esensi dasar dari manusia dan masyarakat akan mengalami kebangkrutan.

Karena kesalahan-kesalahan fatal ini, tampilah aliran baru dari kubu sosialisme ini, yaitu aliran Neo-Marxis. Kaum Neo-marxis tidak berbicara lagi tentang menghilangkan hak individu, tetapi serangan mereka kepada liberal kapitalisme masih tetap dijadikan tema utama. Para ilmuwan sosial di Amerika Latin, seperti Gunder Frank, Sunkel dan lain-lain, mempopulerkan teori *dependencia*. Teori pembangunan yang diterapkan oleh Amerika dan Eropa Barat melalui penguasa-penguasa Dunia Ketiga tidaklah memakmurkan dan menyajikan Dunia Ketiga. Yang terjadi malah sebaliknya. Justru dengan model pembangunan liberal kapitalisme atau model Amerika itu, Dunia Ketiga jadi sangat tergantung kepada para "kapitalis" internasional tersebut. Selain sistem ekonomi nasional perlu diubah dan melepaskan diri dari ketergantungan, tata ekonomi dunia, menurut mereka juga perlu ditata kembali sehingga tidak bersifat

penjajahan Barat terhadap dunia lain (Rais 1984:17-27; Soedjatmoko 1984, dan Hoogvelt 1985).

Selain itu, sebagai pengikut aliran Marxis, teori terakhir ini masih membatasi persoalan kepada masalah ekonomi, aspek-aspek moral, rohaniyah, dan agama. Pada hal aspek-aspek terakhir ini sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya.

b. Liberal Kapitalisme

Istilah liberal kapitalisme dalam tataran ideologis dinamakan aliran *modernisme*. Prinsip dasar dari aliran ini adalah penataan ekonomi dengan memberikan kebebasan dan peluang sebesar-besarnya kepada individu dan swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi liberal ini perlu pula ditopang oleh sistem politik yang demokratis. Dasar pertimbangan adalah nilai-nilai rasional dan pragmatis. Maka usaha pornografis, perjudian, usaha minuman keras yang selama ini diharamkan oleh ajaran agama tidak dipermasalahkan lagi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pasar bebas, mekanisasi dan otomatisasi berbagai peralatan dalam kehidupan adalah sasaran yang ditanamkan supaya dicapai oleh setiap negara yang sedang membangun (Ebenstein 1970).

Snelser mengatakan bahwa pembangunan adalah perubahan dari kehidupan tradisional ke penggunaan teknologi. Teori ini berarti mengharuskan perubahan struktur sosial. Durkheim mengatakan bahwa perubahan yang terjadi adalah dari solidaritas organik ke solidaritas mekanis yang ditandai dengan telah terbaginya masyarakat kepada spesialisasi-spesialisasi yang tinggi (*division of labor*). Weber mengatakan perubahan itu adalah menuju rasionalisme dan kapitalisme. Hobhouse mengatakan perubahan dari *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft*. Parsons lebih merinci lagi bahwa modernisasi bergerak dari kecenderungan mengutamakan kehangatan (afektivitas) ke netral kehangatan, dari berorientasi kepada pribadi ke orientasi kolektif, dari partikularisme ke universalisme, dari asal usul ke prestasi, dari kekaburan ke ketegasan atau kejelasan (Goldthorpe 1992:5-18). Parsons, Sahlins dan Bellah juga mengungkapkan bahwa proses modernisasi itu terletak pada kemampuan manusia dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Tetapi Eisenstadt tidak berpendapat demikian. Untuk mencapai modernisasi tidak perlu dengan mengubah struktur masyarakat. Perubahan dapat dilakukan melalui struktur masyarakat setempat, seperti oligarki Meiji di Jepang ternyata menjadi agen modernisasi (Long 1992:12-38). Para antropolog dan juga sebagian kecil ekonom seperti Gunnar Myrdal juga berpendapat perlunya struktur sosial budaya masyarakat setempat diperhatikan, jangan dihancurkan (Goldthorpe 1992:5-18).

Dari berbagai pendapat di atas dapat pula dipahami bahwa berbagai cara dan pendekatan diungkap dalam rangka mencapai keadaan yang maju, moderen, demokratis, dan makmur. Namun yang terjadi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah kemajuan seperti yang diimpikan atau setiap hari diragakan oleh media cetak dan elektronik. Dunia Ketiga masih tetap berada dalam keterbelakangan dengan berbagai variasinya. Perbedaan antara negara-negara berkembang ini tidak dapat dikatakan karena variasi masing-masing negara dalam menerapkan variabel-variabel modernisme yang sekuler itu. Kalau Turki dikatakan berhasil karena sekularismenya,

tetapi Iran dan Malaysia tidaklah sekuler seperti Turki, Bangladesh yang juga menerapkan pola pembangunan modernisme terbukti tidak berhasil, walaupun hanya dalam bidang ekonomi (Agus 1998).

Maka kritik sosialisme terhadap kapitalisme tidaklah cukup. Bahkan kritik tersebut masih dangkal, hanya pada hal-hal teknis. Degradasi nilai-nilai kemanusiaan, seperti besarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin, krisis keluarga, krisis ekologi, masyarakat moderen mengidap anomie, kehilangan jati diri, dan alienasi, generasi muda hanyut dalam ketergantungan kepada obat-obat bius, menyangkiti masyarakat negara maju dan negara yang sedang menuju negara maju tersebut. Ini jelas bukti kegagalan teori pembangunan liberal kapitalisme. Kenapa demikian? Tampaknya mereduksi dimensi manusia kepada materi, fisik dan dunia atau dasar sekularisme adalah asal usul kesalahan.

Kritik *postmodernisme* terhadap modernisme yang mirip dengan kritik neo-Marxis juga kurang memadai dan kurang mendasar. Kaum postmodernisme, seperti Adorno, Habermas, dan lain-lain, menentang dominasi dan penjajahan modernisme terhadap berbagai suku bangsa dan kelompok minoritas dengan aspirasi politik, budaya, agama dan moral mereka masing-masing. Namun gerakan atau teori postmodernisme juga dinilai terjebak kepada *nihilisme* (Seidman dan Wagner 1992, Lenz dan Shell 1986). Karena kegagalan dan dominasi sekularisme yang ditemukan pada teori-teori pembangunan di atas, baik yang sosialis maupun yang liberal kapitalis, baik yang modernisme maupun yang postmodernisme, di antara ilmuwan dan cendekiawan muslim mengemukakan perlunya kembali kepada Islam dalam usaha pembangunan masyarakat Dunia Ketiga.

c. *Islam sebagai Alternatif*

Di antara ilmuwan muslim di perempatan terakhir abad ke 20 ini ada yang mengkritik teori Barat, baik yang sosialis ataupun yang kapitalis, baik yang modernisme maupun yang postmodernisme, dalam pembangunan sosial yang diterapkan di Dunia Ketiga, khususnya masyarakat Islam. Mereka menyerukan pentingnya pembangunan Dunia Islam didasarkan kepada ajaran Islam. Kritik mereka terhadap pembangunan model Barat bukan hanya karena perbedaan agama dan ideologi antara Islam dan Barat, tetapi juga didasarkan kepada bukti-bukti krisis sosio-kultural dan ekologi yang mengancam dunia akibat dari kecenderungan sekularisme. Di samping itu mereka juga menilai kondisi umat Islam yang telah melaksanakan model pembangunan Barat tidak memperbaiki keadaan dan umat Islam makin terjepit dengan perilaku Amerika yang bertindak dengan semauanya sebagai polisi dunia dan menggarui dunia dengan ekonomi pasar bebas dan politik demokratisnya.

Gagasan perlunya pembangunan sosial didasarkan kepada ajaran Islam ada kaitan dengan gagasan perlunya dilaksanakan Islamisasi ilmu pengetahuan seperti yang diserukan oleh Al-Faruqi, Nasr, Alatas dan lain-lain (Agus 1999:119-126). Sosiologi pembangunan sebagai cabang sosiologi yang harus dikembangkan kembali dalam perspektif atau paradigma Islam, lebih penting lagi untuk dikembangkan dan dipraktikkan dalam perspektif Islam karena arah dan orientasi pembangunan tidaklah bebas nilai, sudah menyangkut menyangkut pilihan dan nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan dan ajaran Islam diyakini sebagai risalah Allah Pencipta alam dan

manusia yang lebih mengetahui alam ciptaan-Nya. Ajaran Islam didasarkan kepada pandangan *tauhid*, artinya mengintegrasikan dimensi kehidupan, wujud dan alam dan *Khaliq*. Pandangan beginilah yang dipercayai oleh penggerak Islamisasi ilmu pengetahuan yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai krisis yang mereka hadapi (Agus 1998). Maka kritik terhadap model pembangunan Barat dengan berbagai teori di atas yang dilancarkan oleh cendekiawan Muslim ini ditujukan kepada dasar pemikiran sekularisme yang berhadapan dengan pandangan Islami.

III. Pembangunan Sosial Orde Baru

Ketika Soekarto mulai memegang tampuk pimpinan pemerintahan tahun 1966, kabinet yang dibentuknya dinamakan dengan Kabinet Pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan menyangkut berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dari bidang ekonomi yang menjadi prioritas pertama dan utama ke bidang politik, hukum, pendidikan, agama, budaya, dan seterusnya. Dengan demikian pembangunan nasional, secara formal dikatakan tidak meniru Barat dengan orientasi sekuler. Negara sekuler tidak menaupuri bidang agama. Di Indonesia bidang agama diurus secara khusus oleh Departemen Agama.

a. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi perubahan orientasi rejim Orde Lama yang beraliran sosialis diubah menjadi berorientasi liberal kapitalis, tetapi tidak disertai dengan demokrasi politik. Penerapan ekonomi liberal dilakukan dalam kondisi pendidikan rakyat masih rendah, sehingga skill, manajemen dan sumber daya mereka masih rendah. Dalam keadaan sosial budaya begini, menempuh sistem ekonomi liberal tentu akan menguntungkan pihak yang memiliki modal besar untuk membeli alat-alat teknologi atau yang punya akses untuk mendapatkan kucuran kredit, baik dari pemerintah ataupun dari hutang luar negeri.

Pengambiln hak milik rakyat, seperti mendirikan pabrik, irigasi dan lapangan Golf tidak dengan ganti rugi yang selayaknya sehingga terjadi kasus-kasus berdarah, seperti kasus Kedung Ombo, Sampang, dlsb.

Akibat tidak cocoknya kondisi sosial budaya Indonesia, ditambah lagi dengan ilat campurnya penguasa rejim Orde Baru memenangkan perusahaan keluarga dan kroni-kroninya, pembangunan ekonomi yang semula tampak memang berhasil dari segi perhitungan kuantitatif, ternyata dengan digoyang sedikit oleh krisis moneter mengakibatkan fundamental ekonomi nasional jadi hancur.

Faktor ketidakadilan pemerintah dalam memberikan kesempatan berkembang bagi pengusaha pribumi adalah faktor krisis moral. Krisis ini tampak seperti dalam budaya *katebelece* atau surat sakti, tender tidak dilaksanakan secara jujur dan terbuka, hak monopoli diberikan kepada keluarga dan kroni-kroni pejabat. Yang terakhir ini jelas bertentangan sekali dengan prinsip ekonomi pasar terbuka. Ketimpangan ini mengakibatkan amuk massa di berbagai kota besar di Indonesia yang kebanyakannya, sebagaimana ditulis oleh Andriof (1998-1999), merupakan pelampiasan dari rasa tidak diperlakukan secara adil selama ini. Selanjut berakibat robohnya struktur ekonomi nasional secara keseluruhan yang mengantarkan Soekarto kepada akhir masa

kekuasaannya bulan Mei tahun 1998 yang lalu. Maka dalam bidang ekonomi pun yang dilaksanakan oleh rejim Orde Baru bukan liberal kapitalisme, tetapi oligopoli.

Secara teoritik atau filosofis, kegagalan pembangunan ekonomi rejim Orde Baru adalah karena tidak cocolnya teori ekonomi liberal kapitalis diterapkan di masyarakat yang dikuasai oleh rejim yang otoriter, korup, tidak adil, tidak berpilih kepada kepentingan rakyat banyak dan tidak jujur (Fukuyama 1995). Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada rasa pengabdian kepada Tuhan dan rasa pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Kecenderungan ini dinamakan dengan kecenderungan sekularisme. Karena itu aspek moral dan religius perlu diikutkan dalam aktivitas ekonomi, bukan saja untuk pendorong aktivitas tersebut sebagaimana dikatakan oleh Weber (1958), tetapi juga untuk mempertahankan sikap adil, jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, mendahulukan kepentingan rakyat banyak (Agus 1998; Qardhawi 1977).

Ternyata sila pertama dari Pancasila tidak efektif dan tidak mewarnai aktivitas ekonomi. Pengetahuan tentang adanya Tuhan berbeda dengan menghayati keberadaan Tuhan dan merasakan kemakmuserannya. Mengakui adanya Tuhan Pencipta tetapi tidak berpengaruh dalam sikap sehari-hari dinamakan fahaman *deisme*. Fahaman ini sangat berbeda dengan *theisme* yang menghayati dan merasakan keberadaan Tuhan dalam aktivitas sehari-hari (Agus 1993).

b. Bidang Politik

Politik yang dilaksanakan Orde Baru adalah politik stabilitas. Ini dimaksudkan untuk mengamankan jalannya pembangunan nasional. Untuk itu dwifungsi ABRI diterapkan. Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tabu untuk dibicarakan. Untuk ini organisasi sosial politik perlu disatukan asas dan landasan perjuangannya. Diwajibkanlah asas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial dan politik. Ideologi dinilai sebagai penghambat pembangunan, sehingga dilaksanakanlah politik deideologisasi. Pada hal agama dan ideologi adalah ruh dan tenaga penggerak masyarakat dalam berbagai kegiatan (Noer 1983; Weber 1958).

Untuk menekan peran partai politik dengan ideologi lain dari Pancasila, Golkar yang diperkuat dengan ABRI dan birokrasi selalu dimenangkan dengan berbagai peraturan, seperti peraturan bahwa anggota MPR yang diangkat oleh Presiden yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Golkar mencapai jumlah 60%. Di samping itu keberadaan partai juga diperlemah dengan rekayasa musyawarah-musyawarah nasionalnya.

Yang dilaksanakan adalah rekayasa-rekayasa asas legalitas formal untuk melanggengkan kekuasaan Presiden. Tetapi politik rekayasa dan otoriter tidak bertahan lama. Otoriter tanpa keadilan dan mendahulukan kepentingan nasional dan rakyat akan berakhir dengan kerusuhan dan amuk massa seperti yang terjadi tahun yang lalu (Andrinof 1998-1999). Kalau dibawakan dalam landasan pemikiran moderen, kepala negara diktator mirip dengan seorang fasis, dan diktatorisme adalah fasisme (Ebenstein 1970). Fasisme dan okokrasi jelas bertentangan dengan pemikiran demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan dikontrol oleh rakyat.

Pemikiran demokrasi sekuler perlu dipertanyakan kembali. Kekuasaan rakyat mengontrol penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat diterima. Tetapi kekuasaannya untuk menetapkan semua hukum perlu dibatasi dengan yang tidak

bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, tidak merendahkan martabat manusia dan tidak merusak lingkungan hidup (Agus 1993).

c. Bidang Hukum

Sebagaimana telah diungkap dalam bidang ekonomi, perangkat hukum yang menjamin persamaan hak dalam usaha dan kepemilikan tidak ada. Undang-undang anti monopoli untuk menjamin jalannya persaingan yang sehat dalam bidang ekonomi tidak ada. Demikian juga undang-undang pembatasan kepemilikan tanah yang pada zaman Orde Lama dinamakan undang-undang Land Reform tidak ada atau tidak jalan. Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan ternyata berpilah kepada perusahaan-perusahaan kroni dan keluarga Presiden. Peraturan upah minimum regional juga sangat rendah sehingga hanya menguntungkan pihak pemilik modal dan perusahaan besar. Proses pengadilan dan penyidikan juga mengalahkan kelas bawah, seperti kasus Marsinah. Ini berarti pembangunan sosial tidak ditunjang oleh hukum dan landasan yuridis formal, serta penerapan proses hukum pun tidak jalan kalau menyangkut kepentingan rakyat banyak dalam berhadapan dengan penguasa dan pengusaha.

Untuk menunjang politik otoriter dan kekuasaan pemerintah juga diperkuat dengan hukum-hukum yang tidak demokratis, seperti Undang-undang Pemilu, susunan anggota DPR dan MPR.

Secara teoritik hukum yang diberlakukan dalam rejim Orde Baru bukanlah hukum untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Hukum yang dilahirkan dan diberlakukan adalah yang berasal dari Penguasa. Hukum tersebut juga berbeda dengan hukum negara-negara liberal kapitalis yang menjamin berjalannya persaingan sehat antara perusahaan-perusahaan sehingga tidak dibolehkan monopoli dan *cartel*. Maka hukum yang dilaksanakan tidak punya rujukan teoritik ekonomi moderen, yaitu liberal kapitalis atau sosialis.

Dalam hal ini jelas nilai-nilai moral tidak lagi ditopang oleh wibawa hukum, tetapi hukum dan proses hukum biasa dilakukan untuk menyinkirkan nilai-nilai moral. Lantarnya moral dalam hukum dan proses pengadilan juga karena kerja membuat hukum dan memproses perkara telah dilepaskan dari agama, tidak lagi sebagai salah satu pencerminan dari iman dan takwa. Melepaskan aktivitas di bidang hukum dari agama dari segi teoritik pemikiran adalah kecenderungan sekularisme.

d. Bidang Agama

Secara yuridis formal negara Republik Indonesia tidak dapat dikatakan negara sekuler karena UUD 45 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan nasional yang dicantumkan dalam setiap GBHN di zaman Orde Baru adalah mendidik manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, dan seterusnya. Departemen Agama dengan berbagai kegiatannya dijadikan alasan bahwa negara Indonesia tidak negara sekuler. Sebagai negara dari masyarakat Tinur yang punya khazanah budaya religius, tidak hidup hanya dengan dimensi material dan fisik, rumusan formal tersebut dapat dipahami.

Di samping itu Indonesia juga dinyatakan tidak negara agama. Negara tidak berlandaskan salah satu agama walaupun sekitar 85% rakyatnya beragama Islam.

Negara bersikap netral terhadap agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia. Karena agama juga dapat menimbulkan konflik antar mazhab dan antar penganut agama yang berbeda, di antara tugas utama pemerintah atau departemen agama adalah mewujudkan kerukunan antara umat beragama.

Namun secara politis dalam dua dekade pertama pemerintahan Orde Baru, sikap pemerintah terhadap Islam bersifat antagonis, menyingkirkan pihak Islam dalam arena politik dan kebijaksanaan publik (Thaba 1996).

Di dekade terakhir pemerintahannya, Soeharto tampak berpilah kepada Islam, seperti menandatangani Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi hukum Islam, mengizinkan berdirinya Bank Mu'amalat dengan sistem Syari'ah. Yang lebih berperan lagi dalam mendekati politik Soeharto dengan pihak Islam adalah dibentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) yang didukung oleh para birokrat pada bulan Desember 1991 sehingga kalangan Islam masuk ke lingkaran kekuasaan melalui Golkar dan ICMI. Arah Politik pemerintah Orde Baru pada dekade terakhir yang memberi peluang kepada pihak Islam untuk berperan dinamakan oleh Thaba dengan pendekatan akomodatif (Thaba 1996).

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara teoritik, pemikiran yang dijadikan landasan dalam menata politik dan negara adalah modernisme. Modernisme adalah pemikiran yang didominasi oleh rasionalisme dan empirisme pragmatik sehingga moral, nilai-nilai budaya rohaniah dan religius dikesampingkan. Dengan demikian modernisme adalah juga pemikiran sekularisme. Walaupun modernisme telah dibantah oleh postmodernisme, namun dominasi liberal kapitalis dengan pemikiran politik demokratisnya makin dominan di dunia, termasuk di Indonesia. Teori pembangunan yang diterapkan di kebanyakan negara berkembang, termasuk di Indonesia, adalah teori modernisme ini. Tetapi karena teori tidak mempertimbangkan nilai budaya dan kondisi negara setempat, teori tersebut dinilai gagal oleh banyak ilmuwan, termasuk ilmuwan Barat itu sendiri.

Indonesia dalam masa pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Gaya kepemimpinan militer dan budaya Jawanya yang paternalistik, dari segi agama bersifat sinkretik sehingga lebih dekat kepada kebatinan, membias dalam masa kekuasaannya yang berlangsung selama 32 tahun itu. Teori ekonomi liberal kapitalis yang membuka persaingan sehat kepada segenap pelaku pasar dan anti monopoli akibatnya tidak jadi diterapkan dan membelok kepada sistem ekonomi yang mementingkan keluarga dan kroni-kroninya. Di samping itu ketergantungan kepada negara-negara blok Amerika makin kuat. Krisis ini juga disertai atau diperkuat dengan krisis politik dan hukum. Krisis-krisis ini disebabkan karena nilai-nilai moral dan ajaran agama tidak lagi dipegang teguh. Agama tidak dijadikan landasan dalam kepemimpinan nasional, tetapi sering dijadikan sebagai justifikasi terhadap kebijaksanaan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.

Secara teoritik dan pemikiran filosofis, teori pembangunan sekuler ternyata gagal, bukan saja di negara-negara Dunia Ketiga, tetapi juga di lingkup global, seperti krisis sosial, psikologis, keluarga, ekologi. Nilai-nilai religius perlu dimasukkan dalam

gerak pembangunan, apalagi dalam menentukan arah reformasi yang tengah dilaksanakan sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin, 1993, *Al-Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1998, "Sosiologi Pembangunan dalam Perspektif Islam: Pandangan Pemakalah Konperensi Internasional tentang Islamisasi Sosiologi dan Antropologi dan Implikasinya dalam Pembangunan Sosial Negeri-negeri Islam di Kuala Lumpur, November 1997", laporan penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.
- Al-Attas, Muhammad Naqib, 1980, *The Concept of Education in Islam*, ABIM, Kuala Lumpur.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji, 1982, *The Islamization of Knowledge*, International Institute of Islamic Thought, Maryland.
- Andrihof, A.Ch., 1998-1999, "Polarisasi Sosial, Sensibilitas Politik, dan Amuk Masa di Perkotaan", *Profil Indonesia*, Jakarta, No. 4, 1998-1999.
- Bodley, John H., 1976, *Anthropology and Contemporary Human Problems*, Canning Publishing Company, California.
- Ebenstein, William, 1970, *Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Fukuyama, Francis, 1995, *Trust. The Social Virtues and the Orientation of Prosperity*, The Free Press, London dll.
- Gilson, Etienne, 1938, *Reason and Revelation in the Middle Ages*, Charles Scribner's Sons, New York.
- Goldthorpe, J.E., 1992, *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*, terjemahan Sukadijo, Gramedia, Jakarta.
- Hoogvelt, Ankie M.M., 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, saduran Alimandan, Rajawali, Jakarta.
- Lenz, Gunter H dan Shell, Kurt L (Eds.), 1986, *The Crisis of Modernity*, Westview Press, Colorado

- Lang, Norman, 1992, *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, terjemahan Tim Pencerjemah Bina Aksara, Bina Aksara, Jakarta.
- Nasr, Seyyed Hossein, 1983, *Islam dan Nestapa Manusia Moderen*, terjemahan Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung.
- Noer, Deliar, 1983, *Islam, Pancasila dan Azas Tanggal*, Yayasan Penkhidmatan, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1975, *Al-Iman wa al-hayah*, Maktabah Wahbah, Cairo.
- Seidman, Steven dan Wagner, David, 1992, *Postmodernism and Social Theory*, Basil Blackwell, Cambridge.
- Soedjatmoko, 1984, *Etika Pembebasan*, LP3ES, Jakarta.
- _____ dkk. (Ed.), *Krisis ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Di Dunia Ketiga*, Yogyakarta, PLP2M, 1984.
- Toffler, Alvin, 1970, *Future Shock*, Random House, New York.
- Wallbank, T. Walter dan Schrier, Arnold, 1974, *Living World History*, Scott, Foresman and Company.
- Weber, Max, 1958, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, translated by Talcott Parsons, Chicago.

* * *